

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA di PROVINSI JAWA TIMUR

Aulia Afafun Nisa¹

Abstract: The reform of local financial governance has been initiated by the central government, which is a particularly important step to manage the governance system. The formulation of problem in this research is how big influence of Original Income, General Allocation Fund, and Profit Sharing on Economic Growth of Regency/City in East Java Province year 2011-2015. The analysis tool used is panel data regression analysis, that is by using classical assumption test and hypothesis test. The result of this research analysis is Local Original Revenue have significant negative effect to Economic Growth of Regency/City in East Java Province in 2011-2015, General Allocation Fund positively influence to Economic Growth of Regency/City in East Java Province in 2011-2015 and Profit Sharing Revenue positive to the Economic Growth of Regency/City in East Java Province in 2011-2015.

Keyword: : Economic Growth, Local Own Revenue, General Alokai Fund, Tax Sharing

Abstrak: Reformasi tata kelola keuangan daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel, yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Hasil analisis penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011-2015, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokai Umum, Bagi Hasil Pajak

Pendahuluan

Selama ini Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki ciri utama kekuasaan yang sangat besar dan dominan pada pemerintah pusat yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk lebih banyak memberikan kewenangan kepada daerah dalam segala hal (Sudarti, 1998). Reformasi tata kelola keuangan daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi memang tidak sama satu dengan lainnya. Di lain pihak banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai yang mengakibatkan daerah-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya. (Indonesia, 2004a)

Transfer pemerintah pusat ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan mereduksi peranan akan dirasakan oleh pemerintah daerah dimana proposri total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam. Pergeseran pada umumnya akan berdampak pada peningkatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri. (Kusuma, 2016). Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini

merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017). Menurut (Rozaqi, 2012) dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian.

Peneliti melakukan penelitian di Propinsi Jawa Timur karena dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 nilai APBD Jawa Timur termasuk paling tinggi di Indonesia dengan jumlah 38 kota/kabupaten. Nilai pendapatan asli daerah di Propinsi Jawa Timur juga semakin tahun semakin mengalami kenaikan. Begitu pula dengan nilai dana alokasi umum dan bagi hasil pajak yang semakin tahun juga mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa kemampuan keuangan di Propinsi Jawa Timur cukup baik. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini hanya menggunakan variabel PAD, DAU dan BHP sebagai independen dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Selain itu perbedaan terletak pada tempat dan tahun penelitian. Adapula perbedaan alat analisis yaitu penelitian ini menggunakan regresi liner berganda dan uji asumsi klasik, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan regresi berganda saja.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut maka dapat ditentukan rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratini, 2014) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Belanja Modal (X_2), dan Dana Alokasi Umum (X_3) adalah positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendriwiyanto, 2014) yang berjudul Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan

Belanja Modal. Hasil penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan ekonomi bukan hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pengelolaan keuangan daerah. (Todaro, 2002). Teori pertumbuhan ekonomi pada awalnya di prakarsai oleh Ricardo dan Malthus yang menganalisis perekonomian di Inggris, pada pertengahan abad ke-20 teori pertumbuhan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama digagasi oleh (Harrod 1939 dan 1948) dan (Domar, 1947), kemudian gelombang kedua diprakarsai oleh Slo dengan teori *neoclassical of economic growth* (1956) dan Swan pada pertengahan tahun 1950. Selanjutnya gelombang ketiga dikemukakan oleh (Romer dan Lucas, 1998), meskipun kedua ahli ekonomi klasik ini berbeda sekali pandangannya dengan Adam Smith yang optimis, Ricardo dan Malthus justru pesimis. Adapun perbedaan antara Adam Smith dan kedua ahli tersebut disebabkan adanya pandangan yang berbeda mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi. (Todaro, 2003)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran (Saptaningsih, 2009). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah (Kusnandar . et all, 2009).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh

alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia, 2004b). Dimana isinya menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH bukan pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Wandira, 2013).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur, pemilihan lokasi penelitian ini karena Provinsi Jawa Timur memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang positif dalam kurun waktu 2011-2015 (BPS, 2015) . Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut merupakan data kuantitatif yang bersifat runtut waktu (*time series*) dalam kurun waktu tahun 2011-2015. Data tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan bagi hasil pajak ini diambil dari Badan Pusat Statistik dan Keuangan. Rujukan dan referensi lainnya yang relevan juga digunakan untuk lebih melengkapi pemaparan hasil penelitian, misalnya dari laporan hasil penelitian, jurnal, dan publikasi terkait lainnya.

Variabel terikat atau *Dependent Variable* pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y) tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan persen. Sedangkan variabel bebas atau *Independent Variable* ada tiga variabel yaitu pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2) dan bagi hasil pajak (X3) yang dinyatakan dalam ribu rupiah tahun 2011-2015.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang akan digunakan dalam penelitian ini

dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Untuk itu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini maka digunakan rumus:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots \dots \dots 1$$

Dimana:

Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi dari X1

β_2 = Koefisien regresi dari X2

β_3 = Koefisien regresi dari X3

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Bagi Hasil Pajak

e_{it} = Standart *error*

Disamping itu juga dilakukan pengujian hipotesis yakni uji F, uji t dan uji koefisien determinasi R^2 . Jika nilai F lebih besar 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5 persen atau menerima hipotesis bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel independen. Uji t dapat dideteksi dengan melihat jumlah *degree of freedom* atau (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka H_0 dapat ditolak atau menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) dapat dideteksi dengan melihat nilai Adjusted R^2 .

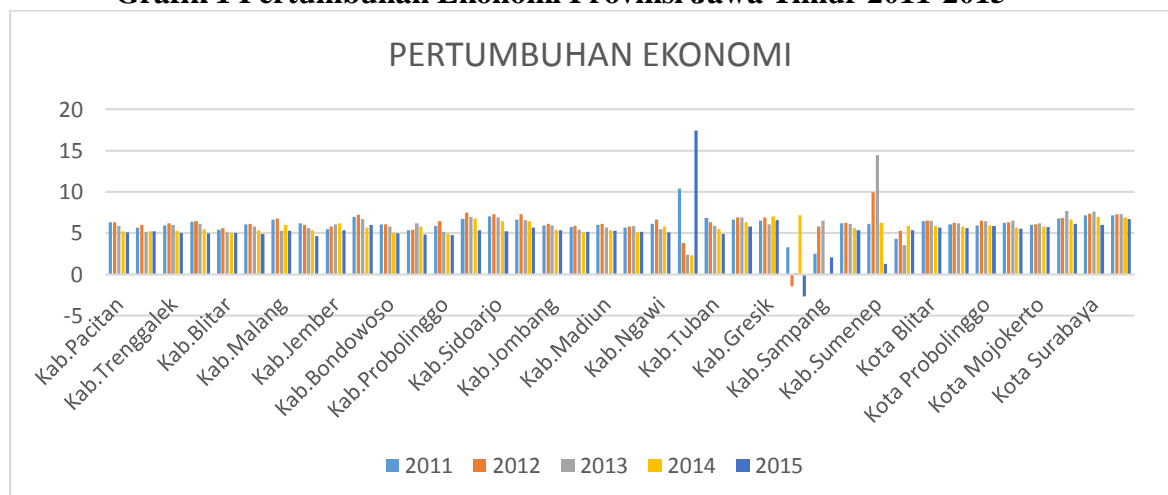
Dalam analisis regresi linier berganda ini uji asumsi klasik yang dihitung menggunakan program *Eviews* antara lain: (1) uji normalitas, cara mendeteksinya adalah dengan melihat probability plot yang membandingkan distribusi dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. (2) Uji multikolinieritas, cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai VIF, apabila nilainya <10 maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas. (3) Uji autokorelasi, cara mendeteksinya adalah dengan menggunakan *Durbin Watson test*. (4) Uji heterokedastisitas, cara mendeteksinya salah satunya adalah menggunakan metode Uji Breusch Pagan. (Ghazali, 2005).

Hasil Dan Pembahasan

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0⁰ hingga 114,4⁰ Bujur Timur dan 7,12⁰ hingga 8,48⁰ Lintang Selatan. Lokasi Provinsi Jawa Timur berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan bagi hasil pajak tahun 2011-2015. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015, pendapatan asli daerah tahun 2011-2015, dana alokasi umum Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015, bagi hasil pajak Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Keempat variabel tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

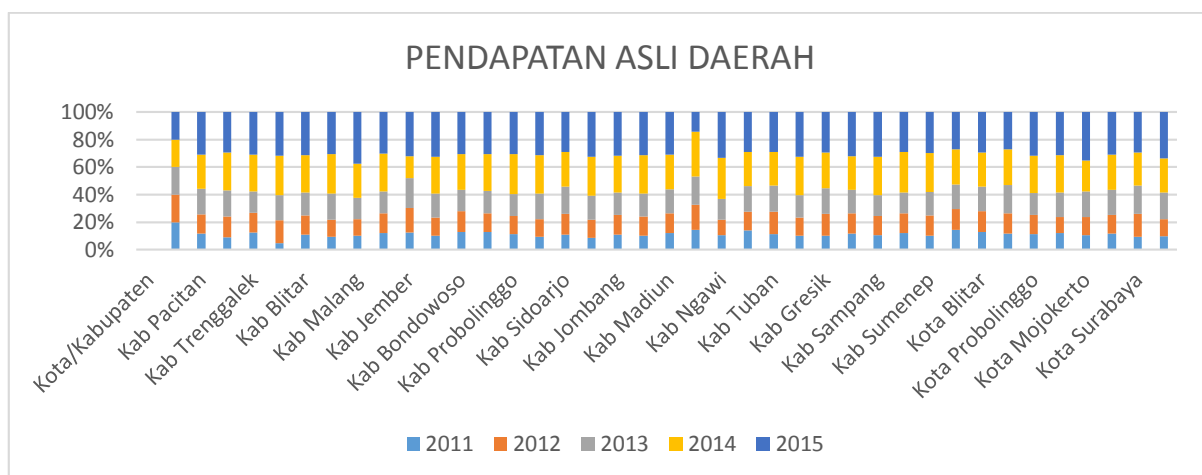
Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari grafik 1 dapat dilihat bahwa tahun 2015 sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, sementara 25 kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Semua wilayah perkotaan mengalami pertumbuhan diatas Jawa Timur kecuali Kota Kediri. Dimana Kota Kediri memiliki jumlah sedikit dibawah Jawa Timur yaitu 5,36 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten yang tumbuh di atas Jawa Timur antara lain Kabupaten Banyuwangi (6,01 Persen), Kabupaten Gresik (6,48 persen), dan Kabupaten Mojokerto (5,65 persen).

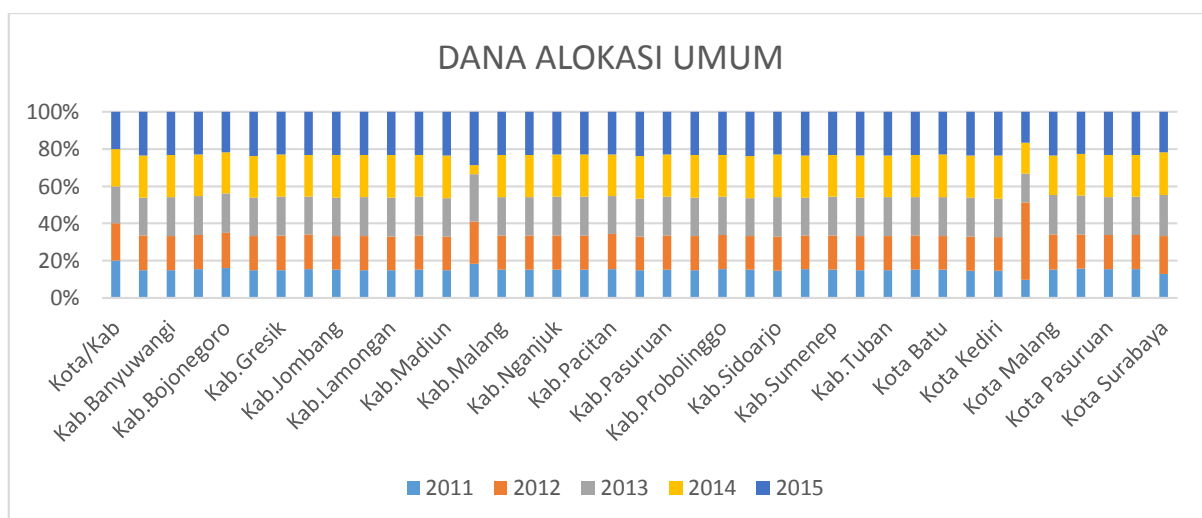
Grafik 2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistika

Dari grafik 2 dapat diketahui pendapatan asli daerah tertinggi di propinsi Jawa Timur dari kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2011-2015. Dimana terdapat di Kota Surabaya dengan jumlah PAD tahun 2011 sebesar Rp1,288,316,279 ,tahun 2012 sebesar Rp2,280,003,560, tahun 2013 sebesar Rp2,791,580,051, tahun 2014 sebesar Rp3,247,459,154 dan tahun 2015 sebesar ,Rp 4,035,339,014. Dimana dapat disimpulkan dalam waktu 5 tahun PAD di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan.

Grafik 3 Dana aokasi Umum Provinsi Jawa Timur 2011-2015

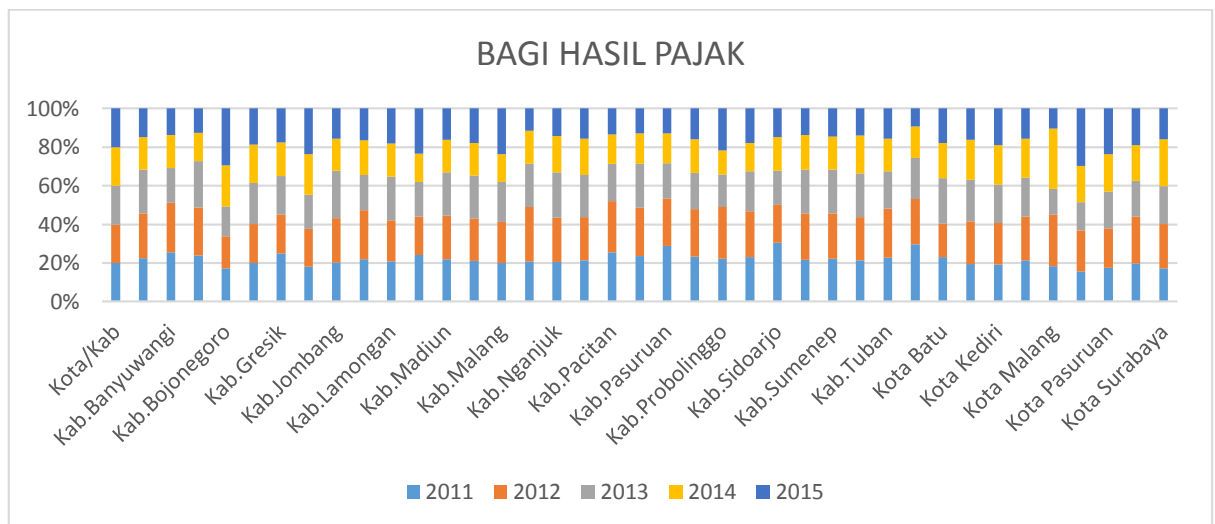


Sumber : Badan Pusat Statistika

Dari grafik 3 dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tertinggi di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2011 berada di kabupaten jember sebesar Rp. 1,058,648,472. Sedangkan dari 2012-2015 dana alokasi umum tertinggi berada di Kabupaten Malang yaitu pada tahun

2012 sebesar Rp. 1,281,612,867, pada tahun 2013 sebesar Rp1,439,234,034, pada tahun 2014 sebesar Rp 1,572,191,571 dan pada tahun 2015 sebesar Rp1,613,161,777. Dimana jumlah Dana Alokasi Umum di Propinsi Jawa Timur dalam 5 tahun ini terus mengalami kenaikan.

Grafik 4 Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Timur 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistika

Dari grafik 4 dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pajak tertinggi di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2014 berada di Kota Surabaya. Dengan jumlah bagi hasil pajak pada tahun 2011 sebesar Rp 225,590,33, pada tahun 2012 Rp 299,746,830 pada tahun 2013 sebesar Rp 255,690,446, pada tahun 2014 sebesar Rp 317, 816,601. Sedangkan pada tahun 2015 dana bagi hasil pajak tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 219,537,894.

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah , dana alokasi umum, dan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data *time series* yang digunakan data tahunan selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai 2015. Sedangkan data *cross section* sebanyak 38 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur. Hasil pengolahan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-6.320433	7.366410	-0.858007	0.3932
X1	-0.469136	0.175104	-2.679191	0.0082
X2	0.065364	0.032624	2.003572	0.0469
X3	1.101969	0.247452	4.453266	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan *Eviews* 9,2017

Tabel 1 diatas merupakan tabel hasil uji *white* model *fixed effect*. Dapat diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah sebagai X1, dana alokasi umum sebagai X2 dan bagi hasil pajak kabupaten/kota sebagai X3 memiliki dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan bagi hasil pajak kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil dari pengujian hipotesis uji t, Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai koefisien sebesar -0.469136 dan nilai probabilitas sebesar 0.0082. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas kurang dari $\alpha=0.05$, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daer (X1) secara spasial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.065354 dan nilai probabilitas sebesar 0.0469. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas kurang dari $\alpha=0.05$, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X2) secara spasial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Bagi Hasil Pajak (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 1.101969 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas kurang dari $\alpha=0.05$, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Bagi Hasil Pajak (X3) secara spasial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dengan menggunakan uji F Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Bagi Hasil Pajak (X3) memiliki nilai probabilitas F-Statistic sebesar 0.000000. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas kurang dari $\alpha=0.05$. Berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Bagi Hasil Pajak (X3) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil *Adjusted R²*, nilai *Adjusted R²* sebesar 0.860234 atau 0.860234%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas Pendapatan asli Daerah (X1), Dana aokasi Umum (X2), dan Bagi hasil Pajakbuka (X3) dalam menjelaskan variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 0.860234 atau 0.860234 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pada model persamaan pengaruh Pendapatan Asli Daearah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuha Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan uji asumsi klasik, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.631395	0.541514
X2	0.631395	1.000000	0.420873
X3	0.541514	0.420873	1.000000

Sumber: data diolah

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8 . Dimana X1 adalah pendapatan asli daerah, X2 adalah dana alokasi umum dan X3 adalah bagi hasil pajak. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Weightd Statistics Sum Squared Resid	Unweightd Statistics Sum Squared Resid
Nilai	271.6165	361.2063

Sumber: data diolah

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa Nilai *Sum Square Reside Unweight Statistics* sebesar 361.2063, sedangkan nilai *Sum Square Reside Weightd* sebesar 271.616570 sehingga terjadi heteroskedastisitas. Maka dilakukan penangana dengan menggunakan uji white dengan hasil yang sama. Uji heterosdaskstias ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan ketidaksamaan varian dan residual.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

	Durbin Watson Stat	Keterangan
Nilai	2.271140	Autokorelasi

Sumber: data diolah

Dari table 4 diatas diketahui nilai *Durbin Watson* Statistik sebesar 2.271140 (d), sedangkan nilai *Durbin Watson* tabel sebesar 1,7306 (dL), 1,7947 (dU), 2,2694 (4-dL) dan 2,2053 (4-dU). Sehingga dinyatakan terjadi autokorelasi karena $d < dL$. Untuk mengetahui signifikasi atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dilakukan Uji Hipotesis dengan menggunakan uji parsial (uji t) dan uji serentak (Uji F).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu maka diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah bertanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur. Dana alokasi umum

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur. Bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mampu menggali potensi sumber-sumber selain dari PAD dengan mengalihkan belanja daerah ke pertumbuhan ekonomi. Namun disisilain tetap ada basis pajak/retribusi daerah harus diimbangi dengan memperhatikan keadilan dan kemampuan untuk mencapai pemenuhan kepentingan publik. Diharapkan pemerintah pusat dapat meningkatkan kembali dalam penyaluran dana alokasi umum supaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat diharapkan dapat memperbaiki mekanisme dalam penyaluran bagi hasil pajak dengan cara memperpendek jalur penyaluran dan mempercepat proses penyaluran ke masing-masing rekening kas daerah yang bersangkutan. Sehingga daerah dapat menerima bagi hasil pajak secara tepat waktu dan menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses penyaluran bagi hasil pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*.
- Halim, A. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*
- Hendriwiyanto, G. (2014). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi*.
- Indonesia, R. (2004a). *Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2004b). *Undang-undang No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Kusnandar . et all. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Hasil Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Maryati dan Endarawati. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 5 No 2.
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Pratini. (2014). *Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat*.
- Rozaqi, A. (2012). *Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah Pada Kabuapten/Kota di Provinsi Bali*.
- Saptaningsih, S. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di*

Provinsi Yogyakarta.

Sudarti. (1998). Otonomi Daerah dan Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.*

Todaro. (2002). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*

Todaro. (2003). *Pembanguna Ekonomi di Dunia Ketiga*

Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.*